

**DINAS TENAGA KERJA
TAHUN 2026**



RENCANA KERJA

TAHUN 2026



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI TAHUN 2024	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Dinas tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2024-2026.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja	25
2.4. <i>Review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	47
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	47
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026	51
3.3. Program dan Kegiatan.....	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI	75
BAB V PENUTUP	88
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 (tahun berjalan)	11
Tabel 2.2. Capaian Kinerja Disnaker Kota Bekasi Tahun 2024	22
Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan RKPD Kota Bekasi Tahun 2026	28
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	46
Tabel 3.1. Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah Kota Bekasi Tahun 2026	48
Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator, dan Target Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026.....	51
Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.....	54
Tabel 3.4. Jumlah Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026	
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas TeKota Bekasi Tahun 2026	76

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1.1.	Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RKPD (Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)	2
Grafik 3.1.	Tingkat Pendidikan Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025	73
Grafik 3.2.	Jumlah Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

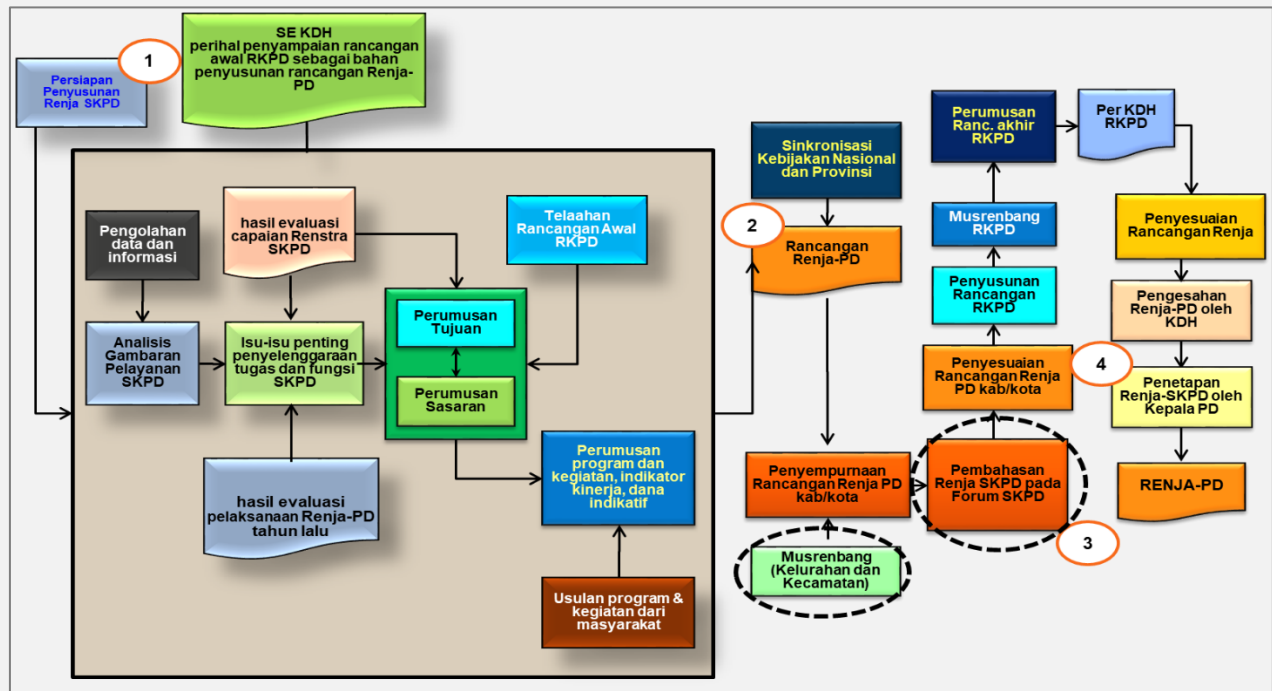
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seluruh Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Renja perangkat daerah merupakan dokumen rencana yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan kebutuhan pendanaan.

Kedudukan Renja Perangkat Daerah sangat strategis dalam menerjemahkan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini didasari oleh proses penyusunan Renja yang telah melalui proses sinkronisasi atau penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sebagai bentuk implementasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada tahun 2025 menyusun Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026 dengan mempedomani Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Kota Bekasi Tahun 2026.

Proses penyusunan Renja dilakukan dalam rangkaian penyusunan RKPD sebagaimana berikut digambarkan keterkaitan serta tahapan penyusunan Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Gambar 1.1.
Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RKPD
(Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diolah

Berdasarkan gambar di atas, penyusunan Renja dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renja, Penyusunan Rancangan Renja, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renja, hingga penetapan Renja.

Dalam penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026 dilakukan penelaahan Renstra/Renja Kementerian/Lembaga terkait yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang memiliki tugas utama Ketenagakerjaan, serta Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Di samping itu, dilakukan penelaahan juga terhadap Renstra/Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, serta memperhatikan Renstra/Renja Dinas Tenaga Kerja wilayah kab/kota sekitar Kota Bekasi, seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang.

Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017

Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13):

23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor);
28. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 11); dan
29. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Teaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026 adalah:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan

kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya aspek perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat;

2. Memberikan gambaran kemampuan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam melaksanakan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan; dan
4. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Tenaga Kerja

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja

2.2. Kota Bekasi Tahun 2024-2026

Pada bagian ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan

capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Tenaga Kerja berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Pada bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja

Pada bagian ini berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan hal yang terkait dengan pelayanan Dinas Tenaga Kerja, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, dampaknya terhadap capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, tantangan dan peluang serta isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada bagian ini berisikan uraian mengenai proses

membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dan disertai penjelasan apabila ada temuan-temuan perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, Pecaker , Perusahaan, Apindo, BKK, yang langsung ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi/ Dinas Tenaga Kerja maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Dinas Tenaga Kerja dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Pada bagian ini dilakukan telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi .

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026

Pada bagian ini dirumuskan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja yang mempedomani Renstra Dinas Tenaga kerja Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada bagian ini berisikan rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan disertai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan, rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program, kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Dinas TENAGA KERJA KOTA BEKASI

Pada bagian ini berisikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan disertai target dan kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI TAHUN 2024

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, melalui penilaian realisasi dari target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan tidak tercapai/tidak terpenuhi/terpenuhi/terlampau dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2024-2026

Pada tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melaksanakan 5(empat) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp **16.046.780.980** (Enam belas milyar empat puluh enam ratus juta tujuh ratus delapan puluh jutaseembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Berdasarkan hasil evaluasi dalam Simpelbang, realisasi fisik kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar 99,97% dengan realisasi anggarannya sebesar 98,80 % atau sebesar Rp **16.046.681.980** (Enam belas milyar empat enam ratus juta enam delapan satu ribu sembilan delapan puluh ribu rupiah).

Hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2024 secara rinci ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Daerah Kota Bekasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target Realisasi Program Kegiatan Tahun lalu n-2			Target program dan kegiatan (n- 1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	10(5+7=9)	11	12	13((5=7=9)	14 (10/4)		
			Penunjang Urusan Pemerintah Daeran									
	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	3 dok	100 %	100 %	3 dok	100 %	100 %
	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	100 %	100 %	3 laporan	100 %	100 %	3 laporan	100 %	100 %
	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.260 org/bln	100 %	100%	1.260 org/bln	100 %	100 %
	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	100 %	100 %	4 laporan	100 %	100 %	4 laporan	100 %	100 %
	1.08	0008	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	100 %	12 laporan	100 %	100 %	12 laporan	100 %	100 %

	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	100 %	12 laporan	100 %	100 %	12 laporan	100 %	100 %
	1.08	0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	100 %	12 laporan	100 %	100 %	12 laporan	100 %	100 %
	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 paket	100 %	8 paket	100 %	100 %	8 paket	100 %	100 %
	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	100 %	6 paket	100 %	100 %	6 paket	100 %	100 %
	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	100 %	2 paket	100 %	100 %	2 paket	100 %	100 %
	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 dokumen	100 %	1 paket	100 %	100 %	2 paket	100 %	100 %
	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	100 %	12 laporan	100 %	100 %	12 laporan	100 %	100 %
	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	100 %	12 laporan	100 %	100 %	12 laporan	100 %	100 %
	1.06	00010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	100 %	1 dokumen	100 %	100 %	1 dokumen	100 %	100 %
	01	0005	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai	2 laporan	100 %	2 laporan	100 %	100 %	2 laporan	100 %	100 %
	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	100 %	2 paket	100 %	100 %	2 paket	100 %	100 %
	1.05	0009	Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	100 %	3 orang	100 %	100 %	3 orang	100 %	100 %
	1.05	00011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
	01.	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	2 laporan	100 %	100 %	100 %	100 %	2 laporan	100 %	100 %
	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	86 unit	100 %	100 %	100 %	100 %	86 unit	100 %	100 %

		1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	13 unit	100 %	100 %	100 %	100 %	13 unit	100 %	100 %
		01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	4 laporan	100 %	100 %	100 %	100 %	4 laporan	100 %	100 %
		1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	100 %	100 %	100 %	100 %	6 Unit	100 %	100 %
		1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	100 %	100 %	100 %	100 %	12 unit	100 %	100 %
		1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	234 unit	100 %	100 %	100 %	100 %	134 unit	100 %	100 %
		1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100 %	100 %	100 %	100 %	1 unit	100 %	100 %
		1.01	0003	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTK Makro yang disusun	0	100 %	0	0	0	0	0	0
07	03	0.01	0001	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih	252 orang	23 %	100 %	100 %	100 %	252 orang	100 %	100 %
07	03	0.01	0003	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Mengikuti Pembinaan	20 lembaga	100 %	100 %	100 %	100 %	20 lembaga	100 %	100 %
2	07	1.03	0001	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi	54 orang	100 %	100 %	100 %	100 %	54 orang	100 %	100 %100 %
2	07	1.04	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 dokumen	100 %	100 %	100 %	100 %	1 dokumen	100 %	100 %
2	07	041	101	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antar Kerja yang Terlayani	70 orang	100 %	100 %	100 %	100 %	70 orang	100 %	100 %
2	07	041	030003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	600 orang	100 %	100 %	100 %	100 %	600 orang	100 %	100 %
2	07	041	040001	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan	90 orang	100 %	100 %	100 %	100 %	90 orang	100 %	100 %
2	07	051	020002	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pendataan Sarana Hubungan Industrial	9.93 %	100 %	100 %	100 %	100 %	9.93 %	100 %	100 %

2	07	051	020002	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 perkara	100 %	100 %	100 %	100 %	4 perkara	100 %	100 %
2	07	051	020004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	35 lembaga	100 %	100 %	100 %	100 %	35 lembaga	100 %	100 %
2	07	051	030005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	5000 orang	0	5000 orang	0	100 %	5000 orang	100 %	100 %

Berdasarkan hasil realisasi capaian indikator program sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, dari 36 (tiga belas) indikator program terdapat 8 (delapan) indikator program melampaui target dan 5 (lima) indikator program lainnya mencapai target 100%. Di samping itu, target indikator kegiatan dan sub kegiatan sebagian besar dapat mencapai target.

Adapun faktor-faktor penyebab keberhasilan mencapai/melampaui target kinerja tersebut adalah:

- (1) adanya komitmen Tim penyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD/RPJMD) dan Tim verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renstra) dalam merumuskan kegiatan, indikator kegiatan dan targetnya serta kebutuhan pendanaannya;
- (2) disusunnya rencana atau rangkaian jadwal pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD/RPJMD) dan verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renstra) yang detil/rinci sehingga memudahkan Tim untuk melaksanakan tugasnya;
- (3) tersedianya berbagai regulasi terkait perencanaan pembangunan;
- (4) dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Namun demikian, terdapat kendala yang dihadapi yaitu pengumpulan data masukan capaian/realisasi dari Badan Pusat Statistik dan Perangkat Daerah terhambat/beberapa terlambat sehingga waktu pengumpulan dan pengolahan data serta perumusan analisis dan rekomendasi menjadi lebih singkat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2024

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

Pada tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi memiliki 3 (tiga) sasaran yang harus diwujudkan yaitu: (1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas; (2) Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan (3) Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja dengan 4 (empat), indikator kinerja

sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja keempat IKU tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kota Bekasi Tahun 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas	Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja	Nilai	65	64.17	98.72 %
		Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja	indeks	80	80	100 %
2.	Memperbanyak Pelatihan kepada kerja lokal berbasis kalaborasi	Tingkat pengangguran terbuka	%	8.55	7.82	0.01 %
4.	Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja	Persentase penanganan sengketa sengketa pengusaha dengan pekerja	%	100	100	100

Sumber: LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2024

Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi selama tahun 2024, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tenaga Krja Kota Bekasi Tahun 2024-2026, serta Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja dengan hasil bahwa seluruh indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama (IKU) mencapai target yang telah ditetapkan.

Dari tabel tersebut di atas dapat dianalisis capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dari tahun 2024, sebagai berikut:

1. Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja target tahun 2024 adalah 65 nilai dan realisasinya sebesar 64.17 sehingga capaian indikator ini adalah 98.72 % nilai target belu tercapai 100 persen disebabkan bukti eviden masih belum lengkap dari bidang-bidang
2. Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja dengan target 80 nilai dengan capaian 80 nilai realisasi 100 persen keberhasilan pada iku ini adalah respon masyarakat terhadap pelayanan Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2024.
3. Tingkat pengangguran terbuka Target pada tahun 2024 Tingkat pengangguran terbuka Target pada tahun 2024 Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2024

sebanyak 153,05 juta orang, naik 3,67 juta orang dibanding Februari 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,80 persen poin dibanding Februari 2024

4. Persentase penanganan sengketa sengketa pengusaha dengan pekerja Keberhasilan penyelesaian di tingkat perusahaan (bipartit) seringkali tinggi di daerah dengan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak dan pemahaman yang kuat tentang hak dan kewajiban.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

Permasalahan utama yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi adalah belum optimalnya perencanaan perencanaan ketenagakerjaan di Kota Bekasi berbasis hasil evaluasi, riset dan inovasi. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi ketenagakerjaan ;
2. Belum optimalnya hasil inovasi dalam memenuhi kebutuhan perencanaan ketenagakerjaan ;

Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Faktor internal meliputi:

1. Kekuatan/ *Strenght* (S)

- a. Struktur organisasi dan tugas serta fungsi organisasi Dinas Tenaga Kerja telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas;
- b. Tersedia jumlah SDM aparatur Dinas Tenaga Kerja yang memadai;
- c. Alokasi dana APBD untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan organisasi tersedia dengan jumlah relatif mencukupi;

2. Kelemahan/ *Weakness* (W)

- a. Belum optimalnya perencanaan Ketenagakerjaan di Kota Bekasi berbasis hasil evaluasi inovasi;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi ketenagakerjaan

3. Ancaman/ *Thread* (T)

- a. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam mengenai ketenagakerjaan dengan berbagai motivasi dan kepentingan;
- b. Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen *stakeholder* (masyarakat, DPRD, atau lembaga lainnya) terhadap berbagai ketenagakerjaan daerah semakin meningkat;
- c. Belum optimalnya peran partisipasi masyarakat dan pihak lain diluar pemerintah secara kolaboratif.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, faktor internal dan eksternal, dirumuskan isu penting yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk tahun 2026 sebagai berikut:

1. **Tingginya Angka Pengangguran:** Salah satu isu utama adalah upaya mengurai pengangguran di Kota Bekasi, yang dikenal sebagai kota industri. Hal ini mencakup tantangan dalam menyerap tenaga kerja lokal secara optimal oleh perusahaan-perusahaan yang ada.
2. **Ketidaksesuaian Keterampilan Tenaga Kerja (Mismatch) dengan Kebutuhan Industri:** Terdapat kesenjangan antara keterampilan dan kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja dengan persyaratan atau permintaan dari dunia industri di Kota Bekasi. Hal ini menuntut optimalisasi program pelatihan kerja.
3. **Dinamika Hubungan Industrial dan Penetapan Upah Minimum Kota (UMK):** Isu ini bersifat sangat aktual, dengan adanya tuntutan kenaikan UMK 2026 dari serikat buruh (seperti tuntutan kenaikan 15%) dan perlunya pembahasan yang mempertimbangkan aspek ekonomi secara komprehensif oleh pemerintah dan asosiasi pengusaha (Apindo). Hal ini seringkali diwarnai aksi demonstrasi buruh di kantor Disnaker dan Balai Kota.
4. **Peningkatan Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK):** Adanya tren PHK yang signifikan (lebih dari 1.000 pekerja pada tahun 2025) menunjukkan adanya ketidakstabilan pasar kerja yang perlu diantisipasi dampaknya di tahun 2026.
5. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Internal:** Dari sisi internal, isu yang dihadapi adalah perlunya perbaikan berkelanjutan dalam sistem perencanaan dan akuntabilitas kinerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta memastikan program/kegiatan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

1.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Proses **review** ini dilakukan untuk memastikan apakah kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah sudah terakomodir dalam Rancangan Awal RKPD atau belum. Dengan demikian, usulan dapat diajukan kembali pada tahapan Rancangan RKPD.

Hasil *review* Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi Tahun 2026 terkait Dinas Tenaga Kerja adalah seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 telah sesuai

dengan kebutuhan Dinas Tenaga Kerja untuk Tahun Anggaran 2026, sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bekasi	Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1260 Orang/bulan	11.088.669.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.260/Orang/bulan	17.000.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 laporan	5.000.0000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	75.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai yang dilatih	0	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bekasi	Jumlah Pegawai yang dilatih	10	78.000.000	

		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	75.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	150.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administra si Umum Perangkat Daerah					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	100.000.000			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	100.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		450.000.000			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		450.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	500.000.000			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	500.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	34 laporan	2.500.000.000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	34 laporan	2.500.000.000	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	350.000.000			umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	350.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	250.000.000		3 unit	250.000.000	3 unit	250.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	150.000.000		2 unit	150.000.000	2 unit	150.000.000	
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	511,00 Orang	1,174,000,000.00		511,00 Orang	1,174,000,000.00	511,00 Orang	1,174,000,000.00	
		Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	3 LPK	30.000.000		3 LPK	60.000.000	20 LPK	60.000.000	
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	60 Perusahaan	100.000.000		60 Perusahaan	100.000.000	60 Perusahaan	60.000.000	
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 dokumen	100.000.000		1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	
Program Penempatan Tenaga Kerja		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	90 org	150.000.000		90 org	102.000.000	90 org	102.000.000	

		Job Fair/Bursa Kerja	300 org	150.000.000		90 org	150.000.000	90 org	150.000.000	
		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	90 org	75.000.000		90 org	75.000.000	90 org	75.000.000	
Program Hubungan Industrial		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,00 Perkara	322.000.000		1,00 Perkara	322.000.000	1,00 Perkara	322.000.000	
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	106,00 Perkara	100.000.000		106,00 Perkara	100.000.000	106,00 Perkara	100.000.000	
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	1,00 Lembaga	1000.000.000		1,00 Lembaga	100.000.000	1,00 Lembaga	200.000.000	
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50 org	200.000.000		50 org	200.000.000	50 org	200.000.000	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Musrenbang disampaikan usulan kegiatan dari masyarakat yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Dalam Musrenbang Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan, maupun Tingkat Kota tidak ada usulan kegiatan dari masyarakat untuk tahun 2026 yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan Kebijakan Nasional Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) merupakan analisis terhadap kebijakan ketenagakerjaan tingkat pusat yang menjadi acuan bagi Disnaker daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk mewujudkan tujuan pembangunan ketenagakerjaan seperti peningkatan kualitas SDM, perluasan akses kerja layak, perlindungan pekerja, dan pemerataan kesempatan kerja, melalui program seperti pengembangan BLK, pelatihan berbasis kompetensi, serta kerja sama industri untuk menciptakan tenaga kerja berkualitas dan ekosistem kerja yang adil. Fokus Utama antara lain :

1. **Pendayagunaan Angkatan Kerja:** Memastikan ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri dan mengurangi pengangguran
2. **Pemerataan Kesempatan Kerja:** Menciptakan akses pekerjaan yang adil untuk semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.
3. **Perlindungan Tenaga Kerja:** Melindungi hak-hak pekerja dan menjamin kondisi kerja yang layak.
4. **Peningkatan Kesejahteraan:** Meningkatkan taraf hidup pekerja dan keluarganya melalui upah layak dan jaminan sosial

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam perumusan ketenagakerjaan, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi harus memastikan arah kebijakan nasional/tema pembangunan nasional dan prioritas nasional tahun 2026 tersebut tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2026 serta dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dalam RKPD Kota Bekasi Tahun 2026, Dinas Tenaga Kerja menyusun sinkronisasi tema dan prioritas pembangunan nasional tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah Kota Bekasi Tahun 2026

Tema ketenagakerjaan Tahun 2027

Nasional	Kota Bekasi
kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2026 akan fokus pada transformasi produktivitas nasional melalui pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi tenaga kerja , dan penguatan peran Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP).	tantang pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga kerja dan Pelaksanaan Job Fair .

Prioritas Ketenagakerjaan	
Nasional	Kota Bekasi
1. Perumusan Rencana Kerja (Renja): Dokumen strategis Disnaker yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan berdasarkan kebijakan nasional.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2. Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK): Revitalisasi infrastruktur, pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi (PBK), dan BLK Komunitas untuk meningkatkan keterampilan.	
3. Kerja Sama Industri: Membangun kemitraan dengan dunia usaha dan industri (DUDI) untuk menyesuaikan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja.	
4. Digitalisasi Layanan: Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah akses informasi dan layanan ketenagakerjaan.	

Renja Dinas Tenaga Kota Bekasi Tahun 2026 ini disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2026, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2026, yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah “**Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera**”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, dilaksanakan misi yang terdiri dari:

1. Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan;
3. **Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;**

4. Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi Pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat;
5. Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren.
6. Memperhatikan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pencapaian visi dan misi Kota Bekasi Tahun 2025- 2029, misi ketiga“Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;

Keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kota Bekasi dalam urusan ketenagakerjaan Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja yang menjadi salah satu aspek penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perencanaan menjadi komponen terbesar dalam evaluasi SAKIP dengan bobot 30 persen. Hal ini berkenaan dengan esensi dari perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah tersebut harus memastikan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi setiap tahunnya serta dijabarkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah tahunan atau penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilaksanakan melalui rangkaian penyusunan Rancangan Awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang, penyusunan Rancangan Akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Dalam proses musrenbang RKPD, pelaksanaan memperhatikan isu gender yaitu partisipasi masyarakat laki-laki dan perempuan yang mengikuti musrenbang. Data peserta pelaksanaan

Musrenbang RKPD Tahun 2026, jumlah laki-laki sebanyak 175 orang

sedangkan jumlah perempuan sebanyak 60 orang. Untuk itu, masih perlu ditingkatkan partisipasi perempuan dalam Musrenbang, salah satunya dengan mengundang lembaga perempuan lebih banyak.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026

Adapun tujuan Dinas Tenaga Kerja Adalah Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu **"Kota Bekasi Nyaman dan Sejahtera"**

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator, dan Target
Dinas Tenaga Kota Bekasi Tahun 2026

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2026
2	3	4	5	7
Meningkatnya Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja.	Tingkat Pengangguran Terbuka			7,32 %
		Meningkatnya Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	7,32

Sumber: Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

3.3. Program dan Kegiatan

Selanjutnya untuk memastikan renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dijabarkan dalam Rancangan Awal (Renja), Dinas Tenaga Kerja akan melaksanakan Program Koordinasi dan Sinkronisasi ketenagakerjaan.

kegiatan Penyusunan renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dan Renja untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi (RKPD) dijabarkan dalam perencanaan Perangkat Daerah (Renja), Dinas Tenaga Kerja .

Program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Tenaga Kerja

Kota Bekasi Tahun 2026 serta prakiraan maju tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun
2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	SATUAN	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (N)		Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2027 (N+1)		sumber dana
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					21.581.765.240			22.048.577.145	
	Belanja Langsung Penunjang Urusan					15.577.118.040			14.970.729.945	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA					15.577.118.040			14.970.729.945	
	Outcome 1 : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Indikator 1 : Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persen (%)	Bekasi		10.000.000			65.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Dokumen	Bekasi		10.000.000	APBD		65.000.000	APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
				Output : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai NSPK	Indikator : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai NSPK	Laporan	Bekasi	3	5.000.000	APBD	3	15.000.000
				Outcome 2: Meningkatkan Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Indikator 2 : Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persen (%)	Bekasi	100 %	14.957.118.040	APBD	100 %	13.410.729.945
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				Output : Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Indikator : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Laporan	Bekasi	100	13.416.686.000	APBD	100	11.520.333.000
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
				Output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Bekasi	1.148 orang/bln	13.411.686.000	APBD	1.148/orsn/bln	11.515.333.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Bekasi					
				Output : Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sesuai NSPK	Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sesuai NSPK	Laporan	Bekasi	5	5.000.000	APBD	5	5.000.000

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Output : Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai NSPK	Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	Laporan	Bekasi	36	905.432.040	APBD	36	972.433.040
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
				Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Bekasi	12	15.000.000	APBD	12	15.000.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
				Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Bekasi	12	385.000.000	APBD	12	500.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
				Output : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Bekasi	12	505.432.040	APBD	12	457.433.040
				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				Output : Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK	Indikator : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Laporan	Bekasi	25	635.000.000	APBD	29	917.963.905
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
				Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator : Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	Bekasi	6	10.000.000	APBD	29	10.000.000

				Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
				Output : Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Bekasi	6	500.000.000	APBD	6	600.000.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
				Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Bekasi	2	50.000.000	APBD	2	50.000.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
				Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	Bekasi	-	10.000.000	APBD	2	15.000.000
				Fasilitas Kunjungan Tamu								
				Output : Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Indikator : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	Bekasi	12	10.000.000	APBD	12	20.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
				Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Bekasi	12	50.000.000	APBD	12	202.963.905
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
				Output : Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sesuai NSPK	Indikator : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Bekasi	-	5.000.000	APBD	1	20.000.000
				Outcome 3: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indikator 3: Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	Bekasi	85		APBD	86	320.000.000
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								

				Output : Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai NSPK	Indikator : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Laporan	Bekasi	1	20.000.000	APBD	1	320.000.000	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
				Output : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Indikator : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Bekasi	-	-	-		150.000.000	
				Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
				Output : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indikator : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Bekasi	3	-	APBD		20.000.000	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
				Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	Bekasi	3	-	-		150.000.000	
				Outcome 4: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Indikator 4: Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persen (%)		100%	590.000.000	APBD		1.175.000.000	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
				Output : Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Indikator : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Laporan	Bekasi	1	70.000.000	APBD	1	300.000.000	
				Pengadaan Mebel									

				Output : Tersedianya Mebel	Indikator : Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Unit	Bekasi		-	APBD	Unit	50.000.000	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
				Output : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	Bekasi	5	70.000.000	APBD	5	250.000.000	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Output : Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Indikator : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Laporan	Bekasi	4	520.000.000	APBD	4	875.000.000	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
				Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Bekasi	6	250.000.000	APBD	6	350.000.000	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
				Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Bekasi	11	20.000.000	APBD	11	25.000.000	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
				Output : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Bekasi	36	150.000.000	APBD	99	200.000.000	

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
				Output : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Bekasi	1	100.000.000	APBD	1	300.000.000
				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						-		-
				Outcome : Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Indikator : Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persen (%)	Bekasi		-	-		-
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)								
				Output : Tersusunnya Rencana Tenaga kerja (RTK)	Indikator : Jumlah Dokumen RTK Makro yang disusun	Dokumen	Bekasi	-	-	-		-
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro								
				Output : Tersusunnya Rencana Tenaga kerja Makro	Indikator : Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	Bekasi	-	-	-		-
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.204.647.200	APBD	100 %	1.254.647.200
				Outcome : Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Indikator : Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen (%)	Bekasi	100 %	1.054.647.200	APBD	100 %	1.054.647.200
				Outcome : Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja	Indikator : Persentase Perusahaan yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas	Persen (%)	Bekasi	100 %	150.000.000	APBD	100 %	200.000.000
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								

			Output : Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Laporan Pendataan Sarana Hubungan Industrial	Laporan	Bekasi -	-	-	APBD	3	100.000.000	
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan									
			Output : Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Indikator : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan			-	APBD		100.000.000	
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota									
			Output : Terlaksananya pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Laporan Perselisihan dan Penyelesaian Hubungan Industrial	Laporan	Bekasi	Bekasi	1.400.000.000	APBD	laporan	2.323.200.000	
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Output : Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	100 %		1180.000.000	APBD	100 %	225.000.000	

				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
				Output : Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselamatkan	Perkara	98	-	-		450.000.000
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota							
				Output : Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Perusahaan	35	150.000.000	APBD	35	175.000.000
				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja							
				Output : Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	-	1.070.000.000	APBD	5000	1.473.200.000
											22.048.577.145

Berdasarkan tabel diatas, program yang akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kota Bekasi pada tahun 2026 adalah:

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026 mengacu pada Tujuan yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja tahun 2025-2029 untuk 5 tahun mendatang yaitu Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja Program dan kegiatan yaitu antara lain :

a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan indikatif:**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. **PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

c. **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**

1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
3. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
4. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

d. **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**

1. Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
2. Job Fair/Bursa Kerja
3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

e. **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok

Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten Pengembangan

3. Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana disajikan di atas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026 perlu didukung oleh aparatur yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Tabel 3.4.
Jumlah Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025

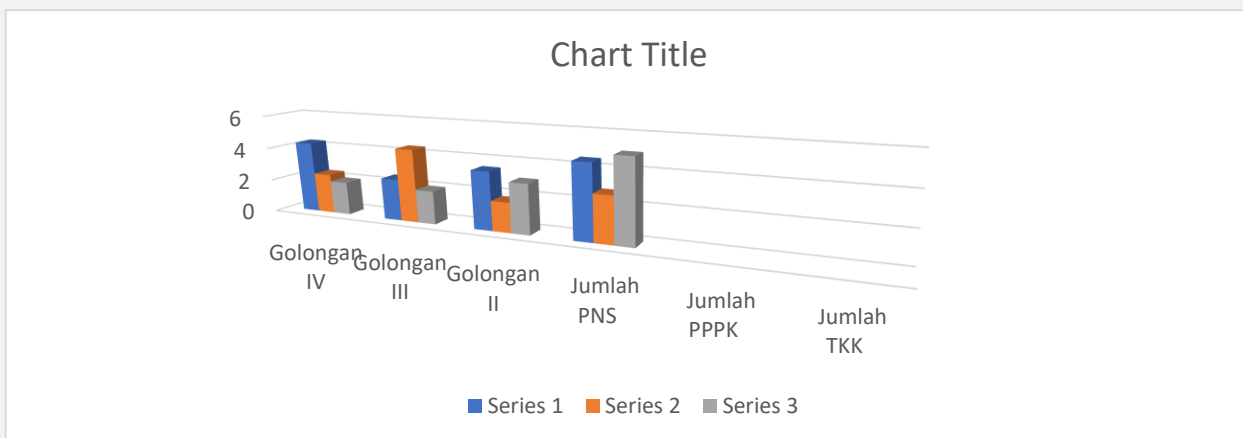
Uraian	Jumlah	Keterangan	
		Laki-Laki	Perempuan
Golongan IV	11	5	6
Golongan III	25	11	14
Golongan II	3	3	0
Jumlah PNS	39	19	20
Jumlah PPPK	32	19	13
Jumlah TKK	1	1	0
Jumlah	72	19	53

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Disnaker Kota Bekasi, Agustus 2025

Apabila dilihat berdasarkan golongan kepangkatan, sebagian besar aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi berada pada Golongan III sebanyak 25 orang atau 79,69%, sisanya Golongan IV sebanyak 11 orang atau 18,75% dan masih ada Golongan II 3 orang atau 1,70%.

Berdasarkan tingkat pendidikan aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, jumlah aparatur PNS dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 11 orang, PNS dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 25 orang, PNS dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 3 orang sebagaimana dalam grafik dibawah ini :

Grafik 3.1.
Tingkat Pendidikan Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026



Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tersebut terdistribusi ke sub unit kerja sesuai dengan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi (Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi , yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Fungsional perencanaan Ahli muda
3. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja ;
4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja
5. Bidang Hubungan Industrial ;

Grafik 3.2.
Jumlah Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025



Secara kuantitas, jumlah aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi saat ini sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian khusus dan kualifikasi pendidikan seperti (1) sarjana informatika terkait (2) Mediator (Fungsional Perencanaan yang terintegrasi dengan penganggaran sampai dengan monitoring dan evaluasi .

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi merupakan implementasi tahun kedua dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025- 2029 yang secara simulasi dengan RKPD Kota Bekasi Tahun 2026.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pada tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi akan melaksanakan 5 (lima) program, 15 (Lima belas) kegiatan, dan 35 (Tiga puluh lima) sub kegiatan, dengan pagu sebesar Rp21.581.765.240,00 yang sumber pendanaannya dari APBD Kota Bekasi.

Berikut rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi disertai indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2026 serta kebutuhan dana atau pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai target tersebut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026

kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	SATUAN	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (N)		Sumber Dana
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					21.581.765.240	
	Belanja Langsung Penunjang Urusan					15.577.118.040	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA					15.577.118.040	
	Outcome 1 : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Indikator 1 : Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persen (%)	Bekasi		10.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Dokumen	Bekasi		10.000.000	APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Bekasi		5.000.000	APBD

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
				Output : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai NSPK	Indikator : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai NSPK	Laporan	Bekasi		3	5.000.000
				Outcome 2: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Indikator 2 : Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persen (%)			90%	14.957.118.040
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
				Output : Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Indikator : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Laporan			6	13.416.686.000
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
				Output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		1.260	1.148 /orang/bln	13.411.686.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Bekasi			
				Output : Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sesuai NSPK	Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sesuai NSPK	Laporan	Bekasi		5	5.000.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

			Output : Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai NSPK	Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	Laporan	36	Bekasi	36	905.432.040
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
			Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	Bekasi	12	15.000.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
			Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Bekasi	12	385.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
			Output : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	Bekasi	12	505.432.040
			Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			Output : Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK	Indikator : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Laporan	26	Bekasi	29	635.000.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
			Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator : Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	-	Bekasi	6	10.000.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
			Output : Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	Bekasi	6	500.000.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						

			Output : Tersedianya Barang Cetak dan Peggandaan	Indikator : Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	Paket	2	Bekasi	2	50.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
			Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	-	Bekasi	2	10.000.000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu						
			Output : Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indikator : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	Bekasi	12	10.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
			Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Bekasi	12	50.000.000
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
			Output : Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sesuai NSPK	Indikator : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	Bekasi	1	5.000.000
			Outcome 3: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indikator 3: Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	85		86	20.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			Output : Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai NSPK	Indikator : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Laporan	-	Bekasi	1	20.000.000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
			Output : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Indikator : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	Bekasi	-	-

			Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
			Output : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indikator : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	Bekasi	3	20.000.000
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
			Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	Bekasi	-	-
			Outcome 4: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Indikator 4: Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persen (%)	100%		100%	590.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			Output : Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Indikator : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Laporan	-	Bekasi	1	70.000.000
			Pengadaan Mebel						
			Output : Tersedianya Mebel	Indikator : Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Unit	-		-	-
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
			Output : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	-	Bekasi	5	70.000.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Output : Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Indikator : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Laporan	4	Bekasi	4	520.000.000

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
			Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	Bekasi	6 250.000.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
			Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	Bekasi	11 20.000.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
			Output : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	86	Bekasi	99 150.000.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
			Output : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	Bekasi	1 100.000.000
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					-
			Outcome : Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Indikator : Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persen (%)	0		0 -
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					
			Output : Tersusunnya Rencana Tenaga kerja (RTK)	Indikator : Jumlah Dokumen RTK Makro yang disusun	Dokumen	0	Bekasi	0 -

			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro						
			Output : Tersusunnya Rencana Tenaga kerja Makro	Indikator : Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	0		0	-
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						1.204.647.200
			Outcome : Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja	Indikator : Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen (%)	N/A	Bekasi	15,28%	1.054.647.200
			Outcome : Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja	Indikator : Persentase Perusahaan yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas	Persen (%)	84,40%	Bekasi	86%	150.000.000
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						
			Output : Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih	Orang	59	Bekasi	200	1.024.647.200
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						
			Output : Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Indikator : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	59	Bekasi	200	1.024.647.200
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						
			Output : Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Indikator : Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Mengikuti Pembinaan	Lembaga	-	Bekasi	20	30.000.000
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						
			Output : Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Indikator : Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	-		20	30.000.000
			Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil						-

			Output : Terlaksananya Konsultasi Pada Perusahaan Kecil	Indikator : Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi	Perusahaan	54	Bekasi	32	75.000.000
			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil						
			Output : Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Indikator : Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	54	Bekasi	32	75.000.000
			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						-
			Output : Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja yang Disusun	Dokumen	1	Bekasi	1	75.000.000
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja						
			Output : Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	1	Bekasi	1	75.000.000
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						
			Outcome : Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Indikator: Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Persen (%)	43,33%		44,67%	3.400.000.000
			Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						-
			Output : Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Pelayanan Antar Kerja yang Terlayani			Bekasi	1070	200.000.000
			Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja						
			Output : Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang	50	Bekasi	70	100.000.000
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja						

			Output : Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	-	Bekasi	1.000	100.000.000
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						-
			Output : Terkelolanya Informasi Pasar Kerja	Indikator : Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Orang			350	150.000.000
			Job Fair/Bursa Kerja						
			Output : Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Indikator : Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	600	Bekasi	350	150.000.000
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						
			Output : Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan	Orang	90	Bekasi	100	3.050.000.000
			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)						
			Output : Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	90	Bekasi	100	3.050.000.000
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						
			Outcome : Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan terhadap Tata Kelola Kerja yang Layak	Indikator : Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen (%)	9,93%		15,35%	1.400.000.000

			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
			Output : Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Laporan Pendataan Sarana Hubungan Industrial	Laporan	-	Bekasi	-	-
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						
			Output : Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Indikator : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	-		-	-
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						
			Output : Terlaksananya pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Laporan Perselisihan dan Penyelesaian Hubungan Industrial	Laporan		Bekasi	4	1.400.000.000
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						

			Output : Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	100		1	180.000.000
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
			Output : Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	98		-	-
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota						
			Output : Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Perusahaan	35		35	150.000.000
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						
			Output : Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	-		5.000	1.070.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi untuk waktu 1 (satu) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan kebutuhan pendanaan. Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026 disusun mengacu pada RKPD Kota Bekasi Tahun 2026, mempedomani Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan memperhatikan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026, Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi akan melaksanakan 5 (empat) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 35 (Tiga puluh lima) sub kegiatan, dengan pagu sebesar Rp **21.581.765.240**.

Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026 akan dilaksanakan kaidah- kaidah sebagai berikut:

1. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026;
2. Dinas tenaga kerja Kota Bekasi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan secara berkala untuk memastikan ketercapaian target kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026;
3. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melakukan perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026 ini apabila terjadi perubahan kebijakan daerah, provinsi atau nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan selama tahun 2026, atau perubahan ketersediaan anggaran.

Rencana tindak lanjut dari penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026 ini adalah penyusunan RKA Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026 yang menjadi dasar penyusunan RAPBD Kota Bekasi Tahun 2026.

Plt.KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA BEKASI

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by several smaller loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dra. IKA INDAH YARTI, M.Si
NIP. 19670114198610 2001